

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak reformasi bergulir tahun 2008, demokrasi sebagai salah satu media kebebasan merambah ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Namun, pada tahap implementasinya sering disalahartikan sebagai kebebasan yang sebebaskan-bebasnya. Ketidakmatangan, ketidakdewasaan dan ketidakarifan warga negara dalam mengimplementasikan demokrasi tidak terlepas dari kurang berhasilnya penanaman nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan, khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (selanjutnya disingkat PKn). Kelas PKn, tidak lagi menggambarkan *miniature* masyarakat yang mencerminkan realitas sosial dan budaya, seperti: berani bertanya, berpendapat, berargumentasi, toleransi, belajar menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tanggung jawab, jujur dan adil baik sesama warga negara, warga negara dengan guru, dan warga negara dengan bahan ajar. Melainkan, telah menjadi ruang indoktrinasi yang membunuh keberanian, kebebasan dan kreativitas warga negara yang secara potensial memiliki kemampuan berdemokrasi secara cerdas untuk memecahkan berbagai permasalahan secara jujur dan adil, baik pada diri sendiri maupun orang lain.

PKn sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang dan jenis sekolah, secara pragmatik memiliki visi *psyco-pedagogis*, yaitu membina warga negara yang demokratis dalam ruang lingkup pendidikan di lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Hal ini sesuai dengan tugas PKn dengan paradigma baru sebagaimana dinyatakan oleh Sapriya dan Winataputra (2010: 1.2), yaitu sebagai

wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi yang dilaksanakan melalui: *civic intelligence*, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial; *civic responsibility*, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dan; *civic participation*, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawab, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.

Dengan demikian, PKn di era reformasi mengalami pergeseran tugas dan fungsi, di mana sebelumnya PKn lebih ditekankan sebagai pendidikan indoktrinasi, dan dengan paradigma baru bergeser menjadi bidang kajian ilmiah pada program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi. Sebagai bidang kajian ilmiah, materi-materi PKn di persekolahan dapat diperdebatkan dan sekaligus dikembangkan sesuai dengan kebenaran nalar dan kebutuhan peserta didik. Guru PKn diberi keleluasan untuk mengembangkan daya nalar dan kreativitasnya dalam mengembangkan sekaligus menerjemahkan materi-materi PKn kepada peserta didik. Begitu juga PKn sebagai wahana utama dan esensi pendidikan demokrasi harus dimaknai bahwa proses pembelajaran PKn dengan cara-cara konvensional harus ditinggalkan, seperti pemikiran bawa belajar itu harus di dalam kelas, belajar itu harus guru yang aktif, belajar itu harus mencapai target kurikulum tanpa memperhatikan kompetensi peserta didik, dan belajar itu harus berpusat guru.

PKn dengan paradigam abru memiliki visi sebagai “Sistem Pendidikan Kewarganegaraan” yang diharapkan berperan sebagai (1) program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal, (2) program aksi sosial-kultural dalam

konteks kemasyarakatan, dan (3) sebagai bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial. Apabila dicermati, visi ini mengandung dua dimensi, yakni (1) dimensi **substansif** berupa muatan pembelajaran (*content and learning experiences*). Konten yang dimaksud sebagaimana termuat dalam standar isi mata pelajaran PKn (Permendiknas Nomor 23 tahun 2006) dan obyek telaah keilmuan serta obyek pengembangan ilmu pengetahuan (aspek *ontologi*), dan (2) dimensi **proses** berupa aspek penelitian berbagai penelitian ilmiah bagi pengembangan ilmu dan kepentingan praktis seperti melalui *Classroom Action Research* atau Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan guru dalam melakukan refleksi proses pembelajaran di sekolah.

Ketiga komponen tersebut secara konseptual dan teoretik sejak tahun 1994 telah diajukan oleh *Center for Civic Education* dalam *National Standards for Civics and Government* (Branson, 1999:8-25), yang menyatakan bahwa secara konseptual dan teoretik sejak tahun 1994 telah mengajukan ketiga komponen tersebut, dan berkat adanya reformasi, termasuk dalam dunia pendidikan, usulan tersebut kemudian diakomodir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2006 tentang Standar Isi, dan dimuat pada bagian pada pengertian, tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran PKn.

Ketiga domain tersebut, menurut Sapriya (2008: 3) satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi “*civic virtue and culture*” yang mencakup “*civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, dan civic competence*” (CCE:1998). Oleh karena itu, ontologi PKn saat ini sudah lebih luas dari pada embrionya sehingga kajian keilmuan

PKn, program kurikuler PKn, dan aktivitas social-kultural PKn saat ini benar-benar bersifat multifaset/multidimensional. Sifat multidimensionalitas inilah yang membuat bidang studi PKn dapat disikapi sebagai: PKn, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak azasi manusia, dan pendidikan demokrasi.

Muatan materi PKn dengan paradigma baru dikembangkan dalam rumusan indikator dan tujuan pendidikan untuk kepentingan persekolahan. Rumusan indikator dan tujuan merupakan kemampuan yang dikembangkan dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang merupakan bagian dari Standar Isi PKn.

Winataputra (2001: 6), menyatakan, PKn sebagai “kajian lintas-bidang keilmuan”, yang secara substantif ditopang oleh ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial, serta humaniora, dan secara pedagogis diterapkan dalam dunia pendidikan persekolahan dan masyarakat mempunyai tugas dan peran yang sangat strategis untuk mewujudkan kehidupan demokrasi sebagai bekal kehidupan di masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu “*civic education/ citizenship education*” merupakan program pembelajaran yang memiliki tujuan utama mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga siswa menjadi warga negara yang baik, melalui pengalaman belajar yang dipilih dan diorganisasikan atas dasar konsep-konsep ilmu politik. Dalam pengertian lain “*civic education*” juga dinilai sebagai “*nurturant effects*” atau dampak pengiring dari berbagai mata pelajaran di dalam maupun di luar sekolah dan sebagai dampak pengiring dari interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang berkenaan dengan pengembangan tanggung jawab warga negara. Dengan demikian, “*civics*” dapat dilihat sebagai kajian akademis yang bersifat

impersonal, sedangkan “*civic education/citizenship education*” dilihat sebagai program pendidikan yang bersifat personal-pedagogis. Di dalam praktik, “*civics*” jelas merupakan konten utama dari “*civic education*”. Secara metaporis, “*civics*” dapat dianggap sebagai muatannya, sedangkan “*civic education*” sebagai wahana atau kendaraannya.

Sementara itu Chreshore (Sapriya, 2008: 3) menyatakan, PKn merupakan bidang studi yang bersifat *multifaset* dengan konteks lintas bidang keilmuan. Namun, secara filsafat keilmuan ia memiliki ontologi pokok ilmu politik khususnya konsep “*political democracy*” untuk aspek “*duties and rights of citizen*”.

Demokrasi merupakan istilah politik pemerintahan yang sudah diakui di dunia sejak abad 20. Demokrasi berasal dari bahasa Latin “*demos*” dan “*cratein* atau *cratos*”, kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris “*democracy*”, yang saat ini telah menjadi kosakata umum yang sudah terbiasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi dapat diartikan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, demokrasi juga diartikan pemerintahan rakyat, bahkan demokrasi juga berarti kebebasan. Dalam konteks pemerintahan, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Hal tersebut mengandung makna, dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertingginya ada ditangan rakyat sebagaimana yang dinyatakan oleh Abraham Lincoln “*the goverment from the people, by the people and for the people*” (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Namun demikian, implementasi demokrasi sering disalahartikan dengan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, sebagaimana dinyatakan USIS (Winataputra, 1991: 4)

bahwa, “demokrasi merupakan konsep yang masih sering disalahpahami dan disalahgunakan manakala rezim-rezim totaliter dan diktator meliter berusaha memperoleh dukungan rakyat dengan menempelkan label demokrasi pada diri mereka sendiri”.

PKn dengan paradigma baru mengamanatkan, agar demokrasi dilaksanakan secara cerdas dan berbudaya. Jadi, bukan demokrasi yang dilaksanakan dengan cara memaksakan kehendak atau dilaksanakan tanpa dikemas dalam bingkai peraturan perundang-undangan. Apabila demokrasi diterjemahkan dengan cara destruktif, intimidatif dan tidak menggunakan akal sehat, maka akan terjadi anarkisme sehingga menyalahi nilai-nilai demokrasi dan bertentangan dengan tujuan PKn sesuai Standar Isi PKn (2006: 2) yang hendak mengembangkan kemampuan:

- 1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarga negaraan; 2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi; 3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; 4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Demokrasi dalam implementasinya tidak dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi harus dilakukan melalui proses pendidikan dan pembiasaan. Sapriya (2008: 28) menyatakan, bahwa membentuk masyarakat demokratis itu perlu direncanakan. Artinya masyarakat demokratis tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan perlu dipersiapkan karena demokrasi merupakan karakter atau watak yang dapat terbentuk melalui suatu proses. Alexis de Toqueville, negarawan Perancis yang hijrah ke Amerika Serikat, menyatakan “*The habits of the*

mind, as well as 'habits of the heart', the dispositions that inform the democratic ethos, are not inherited" (Branson, 1999:2). Artinya, kebiasaan pikiran dan juga 'kebiasaan hati' yakni watak yang menginformasikan demokrasi tidak diturunkan. Dengan kata lain, seorang demokrat belum tentu melahirkan seorang anak yang demokrat apabila anak itu tidak belajar demokrasi. Untuk menjadi seorang demokrat perlu proses pendidikan dan pembelajaran.

Proses pendidikan dan pembiasaan yang ideal adalah dilakukan di sekolah, melalui mata pelajaran PKn. Pendidikan demokrasi yang dilaksanakan di persekolahan bertujuan untuk membangun kecerdasan berdemokrasi bagi peserta didik dan dilaksanakan dalam kelas PKn dalam nuansa sebagai laboratorium demokrasi. Artinya, kelas PKn yang dinamis, di mana dalam proses pembelajaran terjadi interaksi yang aktif antara peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, antara peserta didik dengan lingkungan dan antara peserta didik dengan bahan ajar. Dengan demikian, kelas PKn mampu memberikan pencerahan kepada peserta didik, baik secara pengetahuan, sikap maupun keterampilan dan berdampak pada tumbuhnya kemampuan peserta didik untuk mampu bersikap dan merespon terhadap berbagai permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat dan bangsanya. Selain itu, peserta didik akan memiliki apresiasi tinggi terhadap masalah kemanusiaan, kejujuran, demokratisasi, toleransi dan kedamaian hidup. Dengan kata lain, peserta didik mengembangkan kepekaan keterampilan hidup dalam lingkungan kehidupannya.

PKn dengan paradigma baru mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan warga negara dalam berdemokrasi. Melalui

pembelajaran PKn di kelas, warga negara muda diajak untuk mempelajari, mengkaji dan menilai dan sekaligus dilatih memecahkan berbagai persoalan yang ada di masyarakat sekitarnya dalam kelas PKn yang berfungsi sebagai laboratorium demokrasi dan bila hal ini berhasil, maka demonstrasi – demonstrasi yang anarkis tidak akan terjadi, seperti demonstrasi di Sumatra Utara (Senin, 03/02/2010) yang berujung pada meninggalnya Abdul Aziz Angkat Ketua DPRD Sumatra Utara dan demonstrasi di depan Kantor Dinas Bupati Sragen, Senin (3/05/2010) yang berlangsung rusuh, di mana masa melakukan *sweeping* sejumlah PNS yang akan mengikuti upacara Hardiknas yang berakhir dengan adu mulut sampai adu otot. Contoh lain, anggota DPR yang sering mempertunjukan kehidupan demokrasi yang tidak cerdas, seperti melakukan *wolkout* dalam pengambilan keputusan, berkelahi hanya karena tidak setuju dengan penanganan kasus Bank Century, dan tidak segan-segan saling menjatuhkan atau menjelekkan sesama anggota DPR hanya karena berbeda fraksi dan pandangan.

Berbagai tindakan anarkis yang menyertai pelaksanaan demonstrasi di wilayah Republik Indonesia merupakan dampak dari cara pandang yang sempit dalam menerjemahkan demokrasi dan demonstrasi, sehingga masih sangat diperlukan kecerdasan berdemokrasi yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam memahami demokrasi dan demonstrasi. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus bersikap antisipatif dengan memberikan sentuhan perhatian yang cukup berarti terhadap nilai-nilai demokrasi dan spiritual kepada peserta didik. Disinilah peran dan fungsi guru, khususnya guru PKn yang berada di garda paling depan dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah.

Menurut Ali (1979) dalam sawali.info/2008/01/01/, “sikap pendidik harus demokratis, lebih ‘*conscientious*’, lebih mawas diri, merasakan betul hendaknya secara halus resonansi antara jiwa pendidik dan anak didik”. Semangat pemurnian jiwa (mawas diri) dari pendidik, otomatis akan menular ke jiwa anak didik. Dengan kemauannya sendiri, peserta didik akan mengikuti arahan sang guru, bukan ketakutan yang merangsang gerak jiwanya, melainkan rasa kasih, hormat, dan ikatan batin dengan pendidiknya. Akan tetapi, sekarang ini PKn sebagai wahana pendidikan demokrasi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Proses pembelajaran PKn yang seharusnya lebih mengembangkan kompetensi *civic disposition* dan *civic skill*, dalam praktiknya lebih mengembangkan *civic intellegensia* yang ditandai sistem pembelajaran konvensional. Sehingga, PKn tidak diarahkan untuk memanusiakan manusia secara utuh, lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat kognitif yang kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, religi, dan budi pekerti. Hal tersebut dipertegas oleh Somantri (2001: 245) bahwa:

kurang bermaknanya PKn bagi peserta didik dikarenakan masih dominannya penerapan metode pembelajaran konvensional seperti *ground covering technique*, *indoktrinasi*, dan *narrative technique* dalam pembelajaran PKn sehari-hari.

Budimansyah (2008:18) menyoroti penyebab masalah tersebut lebih luas, meliputi:

- (1) Proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*);
- (2) Pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik;
- (3) Penggunaan alokasi waktu yang tercantum dalam Struktur Kurikulum Pendidikan dijabarkan secara kaku dan konvensional sebagai jam pelajaran tatap muka terjadwal; dan
- (4) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

sebagai wahana sosio-pedagogis untuk mendapatkan “*hands-on experience*” juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktik pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum.

Guru PKn sebagai manajer kelas (pengelola kelas), mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam membangun kecerdasan berdemokrasi dan sekaligus membumikan nilai-nilai demokrasi di kelas. Prinsip berani bertanya, berpendapat, berargumentasi, toleransi, belajar menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tanggung jawab, jujur, kesamaan hak dan kewajiban, tumbuhnya semangat persaudaraan antara peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan antara peserta didik dengan lingkungan belajar serta antara peserta didik dengan bahan ajar harus menjadi “roh” dalam pembelajaran di kelas PKn.

Interaksi guru dan peserta didik bukan sebagai subjek-objek, melainkan sebagai subjek-subjek yang sama-sama belajar membangun karakter, jati diri, dan kepribadian. Kompetensi guru PKn yang demokratis tidak dapat terwujud dengan sendirinya, melainkan membutuhkan proses pembelajaran dan pembiasaan. Forum strategis bagi guru PKn dan peserta didik untuk sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi berada di kelas. Hal tersebut bermakna, guru PKn dalam melaksanakan proses pembelajaran harus menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui penciptaan kelas sebagai laboratorium demokrasi.

Gagasan kelas sebagai laboratorium demokrasi pertamakali dikemukakan oleh John Dewey tahun 1916 dalam buku “*Democracy and Education*”. Dalam buku tersebut, sebagai konsep pendidikan, kelas seharusnya merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium kehidupan nyata. Selain itu, Dewey (Yasa,

2008: 8) menyatakan “keseluruhan kehidupan sekolah harus ditata atau diorganisasikan sebagai bentuk kecil atau miniatur kehidupan demokrasi”. Seperti halnya Dewey, Thelen (Yasa, 2008: 8) mengungkapkan bahwa “kelas hendaknya merupakan miniatur demokrasi yang bertujuan mengkaji masalah-masalah sosial antar pribadi. Maka untuk menciptakan kelas yang demokrasi, tanggung jawab guru sangat dibutuhkan”.

Menurut Ki Hajar Dewantoro, semangat pendidikan adalah “*ing ngarso tsung tulodo*” “*ing madya mangun karso*” dan “*tut wuri handayani*”, yang intinya berporos pada proses pemberdayaan peserta didik sebagai peserta didik. Guru sebagai pendidik sekaligus manajer di kelas harus mampu menunjukkan sikap *ing ngarso tsung tulodo*, dalam arti harus mampu menjadi tauladan bagi peserta didiknya, usia, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya harus senantiasa memberikan prakarsa atau gagasan dan menjadi tauladan bagi peserta didiknya. Prinsip *ing madya mangun karso*, guru sebagai pendidik harus mampu membangun prakarsa atau menumbuhkan semangat dan motivasi. Sehingga, peserta didik mampu berpikir secara aktif kreatif dan inovatif. Sementara itu, *tut wuri handayani*, mengandung makna, bahwa siapapun yang secara kebetulan ada dalam posisi yang diperintah harus patuh dan turut serta apa yang menjadi kehendak umum atau penguasa. Inilah prinsip pendidikan demokrasi dalam dunia pendidikan yang harus dijadikan soko guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran PKn di persekolahan.

Di sekolah, guru PKn senantiasa membangkitkan semangat bereksplorasi, berelaborasi dan konfirmasi melalui berbagai kreasi, dan prakarsa saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan berbagai sumber belajar, metoda,

media dan cara-cara penilaian. Dengan demikian, kelas PKn akan menjadi magnet demokrasi yang mampu menggerakkan gairah peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan keluhuran budi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Peserta didik harus diberi ruang dan kesempatan di kelas untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kreatif dan dinamis. Tugas dan fungsi guru PKn yaitu menjadi fasilitator dan mediator untuk menjembatani agar peserta didik tidak tumbuh menjadi pribadi mekanistik yang miskin nurani dan antidemokrasi (Tuhusetya, 2007). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembelajaran PKn hendaknya membelajarkan interaksi komunikasi yang dinamis yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang mendukung pengembangan *contextualized multiple intelligence* yang mengekspresikan berbagai kemampuan berpikir optimal bagi peserta didik. Hal ini senada dengan pendapat Somantri (2001: 313) yang menyatakan bahwa:

PKn akan lebih bermakna apabila pengetahuan fungsional (*functional knowledge*) dan masalah-masalah kemasyarakatan memperkaya konsep-konsep dasar PKn, dan dikembangkan dialog kreatif dalam pembelajaran.

Dengan demikian, pembelajaran PKn diharapkan dapat mengembangkan potensi diri yang optimal. Potensi daya pikir/intelektual, daya afektual dan psikomotor yang terkait dengan konteks kehidupan sehari-hari yang berbasis pada nilai-nilai dan sumber norma yang berlaku di masyarakat. Guru yang kreatif dalam konteks guru yang memiliki kompetensi merencanakan, memformulasikan, melaksanakan, mengevaluasi, merefleksi, dan menindaklanjuti pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, akan membantu terlaksananya proses pembelajaran PKn di persekolahan yang lebih bermakna. Djahiri (1985: 7-8) menyatakan,

bahwa guru PKn yang kreatif dan inquiry mempunyai ciri-ciri mampu memerankan dirinya sebagai perencana/programer, pelaksana pengajaran, *fasilitator*, *administrator*, *evaluator*, *rewarder*, *manajer*, pengarah dan pemberi keputusan.

Selanjutnya dikatakan, guru yang baik adalah guru yang mau melihat dan menyerap perasaan peserta didiknya, mempunyai pengertian tinggi atas hal tersebut, percaya peserta didik memiliki kemampuan, mampu berperan sebagai fasilitator (pemberi kemudahan, kelancaran-keberhasilan) dan mampu melaksanakan peran sebagai guru inkuiri. Oleh sebab itu, guru PKn harus mau dan mampu mengembangkan kompetensi dirinya melalui berbagai wadah dan sarana profesi, seperti MGMP, sertifikasi dan berbagai forum akademik lainnya. Djahiri (2002: 3–8) menyatakan, bahwa:

guru PKn harus mau dan mampu membina suasana dan proses kehidupan sekolah umumnya dan di kelas khususnya sebagai laboratorium praktikum dan keteladanan target idil pelajaran PKn. Tentunya guru beserta seluruh jajaran personal sekolah harus mampu menjadi contoh teladan peserta didiknya di kelas dan di sekolah peserta didik benar-benar dibina dan dikembangkan totalitas dirinya, yakni kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik baik substansil maupun kemahiran potensinya (*learning skills*), dilatih dan diberi kesempatan untuk pelakonan (*experiencing*) sejumlah sikap perilaku dan budaya hidup yang diharapkan. Demikian selanjutnya perilaku demokrasi di kelas dapat dibawa ke rumah dan lingkungan kehidupan lain sebagai budaya bakunya sehingga secara tidak langsung menjadi agen penular kebajikan bagi lingkungannya (sekolah sebagai *agent of change*).

Jadi, baik pada saat interaksi di kelas maupun proses pengalaman belajar lainnya di luar kelas, peserta didik dibina dengan berbagai pembekalan konseptual/informasi dan sekaligus dilatih bagaimana melaksanakannya dan bagaimana aturan mainnya. Dengan demikian, kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi dapat menjadi indikator pengukuran sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan demokrasi dan bagaimana keharusan berdemokrasi dengan

baik. Peserta didik dilatih berbeda pendapat dan berlatih bagaimana menghargai dan memecahkan perbedaan, menghargai potensi keunggulan dan kelemahan diri, teman, keluarga, kelompok dan masyarakat, serta bagaimana seharusnya bertindak sebagai individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Upaya membangun kecerdasan berdemokrasi peserta didik menjadi hal yang sangat menarik apabila kehidupan demokrasi dibangun secara cerdas, tetapi manakala kehidupan berdemokrasi tidak dibangun secara cerdas akan menjadi sebuah fenomena yang akan membawa bangsa Indonesia ke jurang kehancuran, yakni kehancuran berdemokrasi. Demokrasi yang dibangun bukan berdasar kehendak atau kepentingan sekelompok orang, bukan bersandar atas kebebasan yang sebebas-bebasnya tetapi demokrasi yang bertanggungjawab atas dasar nilai-nilai luhur budaya bangsa yakni Pancasila. Apabila praktik demokrasi sudah melenceng dari aturan dan tata nilai yang ada akan menjadi presiden buruk bagi stabilitas sosial dan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kajian teori menyatakan, demokrasi harusnya dijalankan dengan mulus, dibawakan dengan arif dan bijaksana. Demokrasi bukan hanya dipahami sebagai proses mengambil keputusan tetapi sudah seharusnya dimaknai sebagai seni dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, sandaran implementasi demokrasi adalah idiologi dan konstitusi. Nilai demokrasi yang konstitusional perlu diterapkan dalam kurikulum persekolahan.

Semua instrumen dalam pembelajaran demokrasi, seperti guru, materi pelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran, sistem penilaian, sarana dan

prasarana pembelajaran perlu dipersiapkan dengan matang agar tercermin kehidupan yang demokratis baik di kelas ataupun di sekolah sehingga terwujud sekolah dan kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi. Berdasarkan latar belakang di atas maka membangun kecerdasan demokrasi dalam aspek kelas PKn penyusun tertarik untuk mengangkat sebuah disertasi dengan judul **“Membangun Kecerdasan Berdemokrasi Warga Negara Melalui Perwujudan Kelas Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Laboratorium Demokrasi”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana dikemukakan pada latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah yang dianggap esensial yang dapat diidentifikasi dan menarik untuk diteliti, sebagai berikut.

- a. Hiruk pikuk kehidupan demokrasi yang terasa sejak bergulirnya reformasi tanggal 20 Mei tahun 1998 sampai sekarang, ternyata tidak membawa kehidupan demokrasi tumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan. Demokrasi hanya dimaknai sebagai suatu faham kebebasan yang sebeb-as-besnya, sehingga sering menimbulkan tindakan-tindakan anarkisme. Kondisi demikian tidak terlepas dari belum berhasilnya penanaman nilai-nilai demokrasi yang dilakukan di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran PKn.
- b. PKn sebagai mata pelajaran yang diberikan di semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia mengemban misi dan tugas sebagai pendidikan demokrasi, ternyata dalam proses pembelajarannya masih dilaksanakan dengan

cara-cara konvensional yang berpusat pada guru dan belum secara optimal mengembangkan berbagai potensi kecerdasan berdemokrasi warga negara, sehingga diperlukan adanya perubahan mendasar dan komprehensif sesuai dengan perubahan paradigma PKn agar tidak terjadi krisis atau dislokasi konseptualisasi yang pada gilirannya dapat memperlambat tempo perubahan tersebut.

- c. Idealnya, kelas PKn diwujudkan sebagai laboratorium demokrasi untuk melatih siswa berani bertanya, berpendapat, berargumentasi, toleransi, belajar menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tanggung jawab, jujur dan adil yang dalam proses pembelajarannya guru menggunakan berbagai pendekatan, metode, model, media dan pola serta jenis penilaian. Kenyataannya kelas-kelas PKn masih didominasi oleh interaksi satu arah, dimana dominasi guru begitu kuat dan kreativitas peserta didik tidak nampak.
- d. Kegiatan-kegiatan administrasi profesi dan akademik yang dilaksanakan guru mata pelajaran PKn dalam wadah Musyawarah Guru Bidang Studi/Mata Pelajaran (MGBS/MGMP), dan forum-forum akademik lainnya, seperti seminar, loka karya, diskusi, *workshop* dan pelatihan-pelatihan, bahkan sertifikasi guru cenderung hanya bersifat formalitas, dan sekedar melaksanakan tugas pimpinan untuk pemenuhan kewajiban normatif tidak dilaksanakan secara profesional.

2. Rumusan Masalah

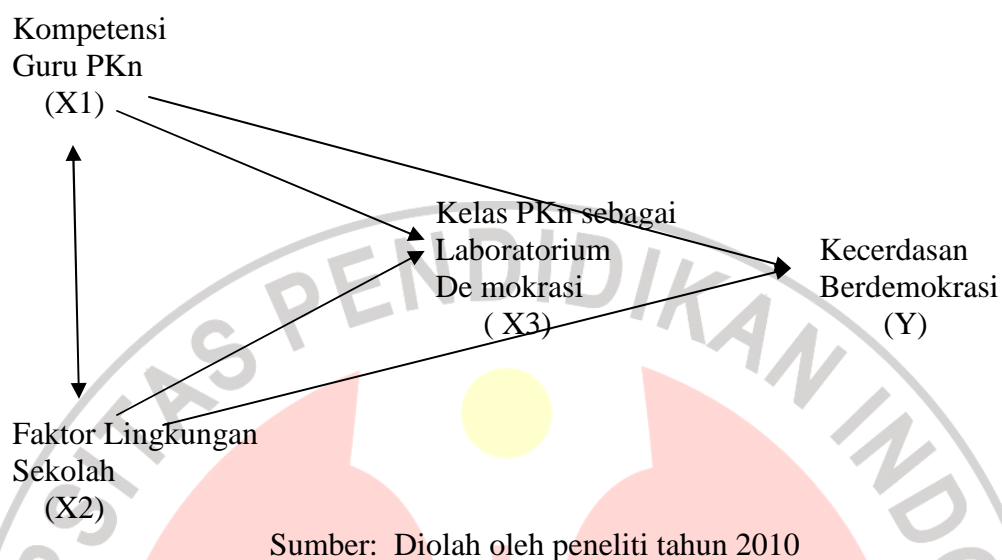
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana membangun kecerdasan berdemokrasi

warga negara melalui perwujudan kelas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai laboratorium demokrasi?”

Kelas sebagai laboratorium demokrasi pada dasarnya adalah pelaksanaan atau praktik pembelajaran PKn dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di dalamnya, seperti pendidik, peserta didik, lingkungan dan bahan ajar yang melalui berbagai pendekatan, metode, model, media, pola dan jenis penilaian. Oleh karena itu, rumusan masalah di atas dijabarkan ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut :

- a. Apakah terdapat pengaruh signifikan kompetensi guru PKn, faktor lingkungan sekolah dan kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi yang saling melengkapi (secara interadiasi) terhadap kecerdasan berdemokrasi warga negara muda sebagai peserta didik?
- b. Apakah terdapat pengaruh signifikan kompetensi guru PKn terhadap kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi?
- c. Apakah terdapat pengaruh signifikan faktor lingkungan sekolah terhadap kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi?
- d. Apakah terdapat pengaruh signifikan kompetensi guru PKn terhadap kecerdasan berdemokrasi warga negara muda sebagai peserta didik?
- e. Apakah terdapat pengaruh signifikan faktor lingkungan sekolah terhadap kecerdasan berdemokrasi warga negara muda sebagai peserta didik?
- f. Apakah terdapat pengaruh signifikan kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi terhadap kecerdasan berdemokrasi warga negara muda sebagai peserta didik?

Sesuai rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, pola hubungan antarvariabel penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Bagan 1.1**HUBUNGAN VARIABEL PENELITIAN****C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, menyeleksi, dan mengorganisasikan informasi teoretik dan empirik yang berkaitan dengan upaya membangun kecerdasan berdemokrasi warga negara muda melalui perwujudan kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi. Secara khusus penelitian bertujuan untuk:

1. menguji hipotesis dan menemukan pengaruh signifikan kompetensi guru PKn, faktor lingkungan sekolah dan kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi secara bersama-sama terhadap kecerdasan berdemokrasi warga negara muda sebagai peserta didik;
2. menguji hipotesis dan menemukan pengaruh kompetensi guru PKn terhadap kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi;
3. menguji hipotesis dan menemukan pengaruh faktor lingkungan sekolah terhadap kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi;

4. menguji hipotesis dan menemukan pengaruh kompetensi guru PKn terhadap kecerdasan berdemokrasi warga negara muda sebagai peserta didik;
5. menguji hipotesis dan menemukan pengaruh faktor lingkungan sekolah terhadap kecerdasan berdemokrasi warga negara muda sebagai peserta didik; dan
6. menguji hipotesis dan menemukan pengaruh kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi terhadap kecerdasan berdemokrasi warga negara muda sebagai peserta didik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Secara Teoretis

Studi ini bermanfaat untuk pengembangan strategi pembelajaran PKn dalam meningkatkan kompetensi kewarga negaraan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarga negaraan) secara utuh dan kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi yang berintikan *value education*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya Jurusan PKn sebagai institusi pembina profesi guru dan calon guru PKn untuk mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran dan model-model pembelajaran demokrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan merespon tantangan/kebutuhan di era global. Selain itu, untuk mengkaji dan mengembangkan model-model praktik

PKn untuk melatih dan membiasakan warga negara muda sebagai peserta didik hidup berdemokrasi secara tertib sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan.

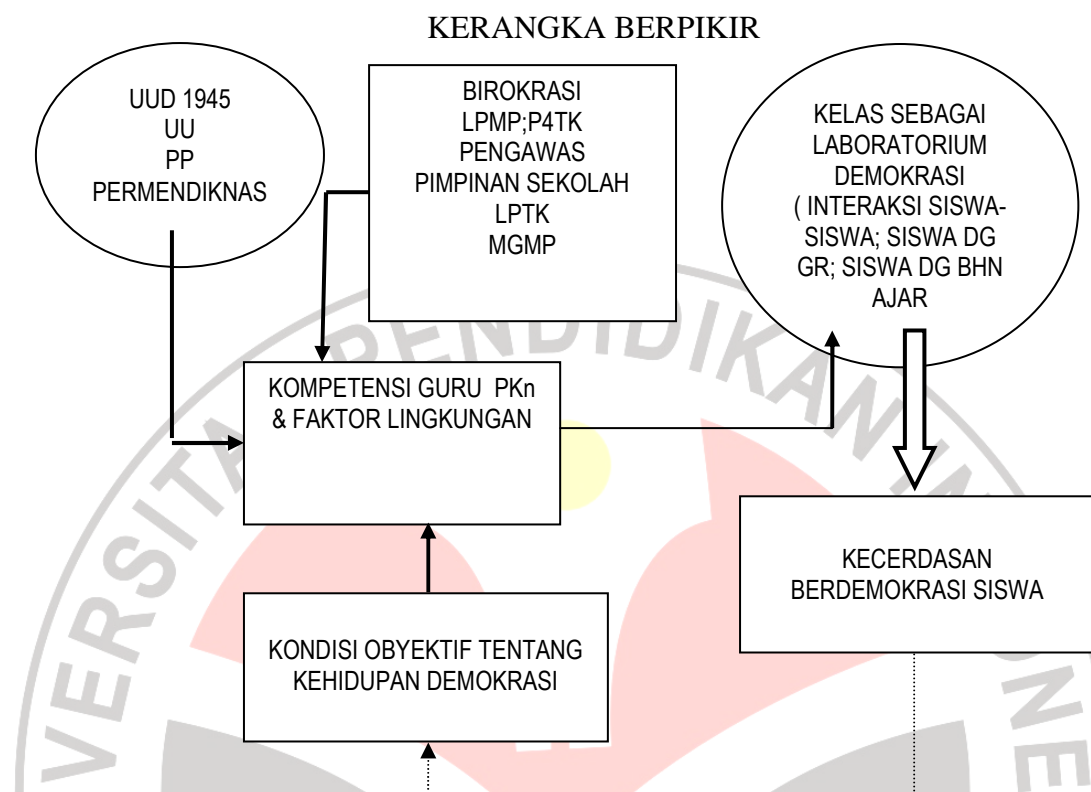
- b. Bagi sekolah penelitian ini berguna sebagai *feedback* sekaligus parameter untuk mengetahui seberapa jauh inovasi pembelajaran PKn telah bergulir dan membawa hasil yang diharapkan dan melatih peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi di kelas PKn dan lingkungan sekolah yang dilaksanakan secara berkesinambungan melalui berbagai program pembiasaan.
- c. Bagi guru PKn bermanfaat untuk menganalisis sekaligus mengimplementasikan berbagai model pembelajaran demokrasi di kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi, sehingga pada akhirnya ditemukan model pembelajaran demokrasi yang sesuai di kelas dan sekolahnya masing-masing.
- d. Bagi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, penelitian ini berguna terutama untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran PKn sebagai upaya mempersiapkan dan menjadikan warga negara sebagai calon-calon demokrat sejati di masa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran dan Definisi Operasional

1. Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan dan memfokuskan berpikir dalam memandu penelitian ini, peneliti menuangkan kedalam kerangka berpikir penelitian melalui bagan sebagai berikut di bawah ini:

BAGAN 1.2



2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul “Membangun Kecerdasan Berdemokrasi Warga Negara Muda melalui Perwujudan Kelas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Laboratorium Demokrasi” terdapat 6 konsep utama, yakni : (1) membangun kecerdasan; (2) kecerdasan berdemokrasi; (3) warga negara; (4) perwujudan kelas PKn; (5) Laboratorium demokrasi; (6) Kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi. Keenam konsep yang dimaksud dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Membangun Kecerdasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2007, kata membangun mempunyai makna membina atau memperbaiki sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam penelitian ini yang dimaksud membangun adalah upaya-upaya

yang dilakukan guru PKn untuk membina dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi di kelas yang diwujudkan sebagai laboratorium demokrasi.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas menyatakan, kecerdasan merupakan istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Stenberg dan Slater (1982) yang mendefinisikan kecerdasan sebagai “tindakan atau pemikiran yang bertujuan dan adaptif”.

Kecerdasan terbagi menjadi dua, yaitu: kecerdasan umum yang biasa disebut sebagai faktor-g maupun kecerdasan spesifik, akan tetapi pada dasarnya kecerdasan dapat dipilah-pilah. Thurstone membagi kecerdasan secara spesifik, meliputi: pemahaman dan kemampuan verbal, angka dan hitungan, kemampuan visual, daya ingat, penalaran dan kecepatan perceptual.

Yang dimaksud kecerdasan dalam penelitian ini adalah kemampuan warga negara muda sebagai peserta didik untuk mengembangkan daya nalar, pikiran, dan gagasan untuk mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan berbagai permasalahan yang dilaksanakan secara demokratis.

Dengan demikian, yang dimaksud membangun kecerdasan dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan guru PKn untuk membina, mengembangkan dan melatih kemampuan daya nalar, pikiran, dan gagasan peserta didik untuk

mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan berbagai permasalahan yang dilaksanakan secara demokratis.

b. Demokrasi

Demokrasi dalam penelitian ini adalah bagaimana peserta didik berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan yang berlangsung di sekolah, masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Kecerdasan Berdemokrasi

Kemampuan warga negara muda sebagai peserta didik untuk mengembangkan kemampuan daya nalar, pikiran, dan gagasan untuk mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan berbagai permasalahan yang dilaksanakan secara demokratis, dengan berprinsip pada 3 pilar PKN, yaitu *civic Intellegencia*, *civic responsibility* dan *civic participation*. Ini artinya bagaimana warga negara muda memahami berbagai tata cara mempraktikan kehidupan demokrasi, bagaimana warga negara muda bertanggungjawab dalam mempraktikan demokrasi dan bagaimana warga negara muda melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupannya.

d. Warga Negara Muda

Warga negara menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Muda dalam penelitian ini adalah warga negara yang berprofesi sebagai peserta didik di Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA) yang berusia antara 15 – 17 atau 16 – 18 tahun.

Warga negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peserta didik yang duduk di bangku SMA. Untuk selanjutnya penyebutan istilah warga negara muda dalam penelitian ini akan ditulis secara bergantian dengan istilah peserta didik.

e. Perwujudan

Perwujudan dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan guru menciptakan atau membuat kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi.

f. Kelas Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas dalam pendidikan memiliki sejumlah arti terkait. Kelas dapat berarti sekelompok murid yang menghadapi pelajaran ataupun kuliah tertentu di perguruan tinggi, sekolah, maupun lembaga pendidikan. Kelas juga bisa merujuk pada kegiatan belajar-mengajar itu sendiri: kelas dalam drama-drama karya William Shakespeare. Kelas dapat pula berupa sekelompok murid di tingkatan yang sama dalam sebuah institusi: kelas satu; ataupun sekelompok murid yang lulus dari lembaga tersebut di saat yang sama: kelas 2005 (*bandingkan* alumnus/i).
(*Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*).

Kelas dalam disertasi ini adalah ruang yang berisi komponen peserta didik, pendidik, lingkungan belajar dan bahan ajar yang keseluruhannya saling membangun untuk berinteraksi secara aktif dalam upaya memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kompetensi dasar atau materi pembelajaran secara demokratis.

g. Kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi

Laboratorium sering diartikan sebagai ruangan yang di dalamnya terdapat sejumlah alat-alat dan bahan praktikum. Selama ini kita mengenal Laboratorium

(disingkat *lab*) adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa.

Dalam konteks disertasi ini, laboratorium adalah tempat belajar mengajar melalui penggunaan berbagai pendekatan, metode, model, media, dan pola penilaian yang dapat menghasilkan pengalaman belajar dimana peserta didik saling berinteraksi, baik dengan sesamanya, dengan pendidik, dengan lingkungan belajar maupun dengan bahan yang dapat diamati secara langsung dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Jadi, suatu laboratorium sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu serta sistem pembelajaran PKn. Ciri dari laboratorium demokrasi di sini adalah:

- a. Kelas yang selalu hidup, karena adanya interaksi aktif antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, antara peserta didik dengan pendidik, antara peserta didik dengan bahan ajar dan antara peserta didik dengan lingkungan belajar.
- b. Terbangunnya budaya “ *information share*”, yaitu saling membagi informasi antara pendidik dengan peserta didik
- c. “ *Issue discussion* “, yakni membahas atau mendiskusikan isu-isu atau informasi-informasi yang berkembang dalam masyarakat dan negara.

- d. *“Decission making mode“*, yakni keputusan selalu dibangun di atas kepentingan bersama dan dibicarakan secara bersama-sama di kelas.
- e. *“Inpact agree”*, yakni bagaimana semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran tersebut menyadari dampak dari persetujuan yang telah dilakukan secara bersama-sama di kelas, dalam arti semua pihak yang terlibat harus melaksanakan berbagai dampak dari keputusan yang telah diambilnya.
- f. *“Climate maintained“*, yakni iklim atau suasana kelas harus dapat dijaga secara bersama-sama
- g. *“Susfacted accepted”*, yakni ketika proses pembelajaran selesai dan keluar kelas, pendidik harus secara ramah menyapa peserta didiknya, misalnya *“Bagaimana kalian dalam melaksanakan pembelajaran tadi ?”*

Dengan demikian, kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi adalah ruangan kelas untuk pembelajaran PKn dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan inkuiri kolaboratif dan pembuatan keputusan bersama yang mereka pilih.

Perimbangan praktis perlunya mewujudkan kelas PKn sebagai laboratorium demokratis adalah :

- a. memberikan pengalaman langsung (*learning by doing*) kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam kelas dan cara kerja demokrasi;
- b. implementasi berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk tata tertib kelas dan sekolah sebagai salah satu sokoguru demokrasi;
- c. berlatih membuat keputusan bersama secara arif dan bertanggungjawab;

- d. berlatih menghargai, menghormati dan bertoleransi terhadap berbagai pendapat/gagasan yang dikemukakan oleh guru dan peserta didik lainnya;
- e. mengembangkan keterampilan berfikir positif dan berbicara secara runtut bagi peserta didik;
- f. melatih kepekaan peserta didik dalam merespon pendapat guru dan teman lainnya, termasuk merespon berbagai persoalan nyata yang ada di masyarakat; dan
- g. melatih peserta didik untuk mampu dan tanggap dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di sekitar kehidupannya.

Guru sebagai nara sumber dan pengarah di kelas dituntut untuk dapat menciptakan iklim belajar yang demokratis, karena kondisi ini akan berdampak pada terciptanya suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, terutama perkembangan berfikirnya, termasuk perkembangan nilai dan nalarnya. Sehingga peserta didik menjadi lebih berdaya dalam mengembangkan kompetensi dan potensi dirinya.

Dengan demikian, konsep dan nilai-nilai demokrasi yang terjadi dalam suatu kelas PKn akan mempunyai makna bukan hanya sekedar bentuk demokrasi dalam pemerintahan, demokrasi merupakan tujuan hidup dimana kebersamaan dalam bertukar pendapat, bersama-sama memecahkan permasalahan dan harapan serta kemampuan untuk mengambil keputusan bersama merupakan betuk bagian dari kehidupan demokrasi.

F. Asumsi

1. Kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran PKn akan memudahkan guru dalam mengekspresikan kemauan dan kemampuannya dalam memvariasikan berbagai keterampilan mengajar, baik yang menyangkut pengembangan bahan ajar, metode, model dan media serta penilaian pembelajaran. Kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru tersebut akan memotivasi peserta didik untuk lebih mengembangkan kompetensi dan kemampuannya dalam pembelajaran PKn di kelas maupun di sekolah.
2. Lingkungan belajar yang demokratis perlu diwujudkan dalam satuan pendidikan secara utuh dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah. Untuk membangun lingkungan belajar yang demokratis perlu dibangun sinergi sosio- edukatif internal atau kerja sama yang bersifat kemasyarakatan yang mendidik, maka perlu dilakukan upaya sistematis dan sistemik untuk menjadikan sekolah sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis dalam upaya membangun kecerdasan berdemokrasi warga negara muda yang berstatus sebagai peserta didik.
3. Kelas seharusnya merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium kehidupan nyata. Selain itu Dewey (1916) menyatakan, keseluruhan kehidupan sekolah harus ditata atau diorganisasikan sebagai bentuk kecil atau miniatur kehidupan demokrasi. Kelas hendaknya merupakan miniatur demokrasi yang bertujuan mengkaji masalah-masalah sosial antar pribadi (Thelen).

4. Iklim kelas yang terbuka untuk diskusi merupakan faktor penting dalam memperkuat wawasan dan partisipasi kewarga negaraan. Pembelajaran PKn yang mewadahi kelas sebagai “laboratorium demokrasi” sangat penting dalam mengembangkan kompetensi kewarga negaraan (Hahn dan Purta, 1999).
5. Sekolah tidak lepas dari masyarakat, karena sekolah didirikan oleh masyarakat untuk mendidik anak menjadi warga negara yang berguna dalam masyarakat. Di samping itu, masyarakat atau lingkungan dapat pula merupakan laboratorium dan sumber yang penuh kemungkinan untuk memperkaya pembelajaran. Oleh karena itu, setiap guru harus mengenal masyarakat dan lingkungannya dan menggunakannya secara fungsional dalam pembelajarannya (Nasution, 1986: 133).
6. Perlu dikembangkannya berbagai kecerdasan untuk mendukung pelaksanaan demokrasi, khususnya di Indonesia, yang mencakup “...kecerdasan ruhaniyah, kecerdasan naqliyah, kecerdasan aqliyah (otak logis-rasional), kecerdasan emosional (nafsiyah), kecerdasan menimbang (judgment), kecerdasan membuat putusan dan memecahkan masalah (*decision making and problem solving*), dan kecerdasan membahasakan serta mengkomunikasikannya” (Sanusi, 1998: 3).
7. Pada dasarnya demokrasi itu tidak diturunkan melalui pewarisan, akan tetapi harus dilakukan melalui proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dapat dilaksanakan melalui berbagai jalur, yaitu pendidikan formal (disekolah dan perguruan tinggi), non formal (pendidikan di luar sekolah dan informal (pergaulan dirumah dan masyarakat cultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep,

prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam berbagai konteks. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, mehayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat (Winataputra, 2006: 12).

8. Pembelajaran PKn yang dilaksanakan secara demokratis akan berdampak pada peserta didik yang akan belajar dengan baik karena apa yang dipelajari berhubungan dengan apa yang dilihat, dan dialami dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan di mana dia berada. Hal ini berarti Pembelajaran PKn yang dilaksanakan secara demokratis di kelas, memberi kesempatan secara luas dan terbuka kepada peserta didik untuk mengkaitkan isi materi dengan konteks kehidupan sehari-hari dalam upaya menemukan makna kehidupan (Johnson, 2002:24).
9. Gagasan demokratisasi pendidikan didasari oleh pertimbangan yang sederhana, yakni memperbesar partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan pelibatan siswa dalam proses pembelajaran, yang tidak sekedar membuat mereka aktif dalam proses pembelajarannya, tapi juga mereka diberi kesempatan dalam menentukan aktivitas belajar yang mereka lakukan, bersama-sama dengan guru mereka. Berknaan dengan pendidikan demokrasi dalam upaya demokratisasi pendidikan di persekolahan, maka salah satu kondisi atau syarat yang tidak dapat diabaikan adalah bagaimana mewujudkan sekolah itu sendiri sebagai sekolah demokratis (Rosyada, 2004: xxii)

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “kompetensi guru dan faktor lingkungan sekolah serta kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kecerdasan berdemokrasi warga negara muda sebagai peserta didik“. Untuk lebih spesifik dan jelasnya, hipotesis tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa hipotesis yang lebih khusus/rinci, sebagai berikut:

1. Kompetensi guru PKn, faktor lingkungan sekolah dan kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kecerdasan berdemokrasi warga negara muda sebagai peserta didik
2. Kompetensi guru PKn, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap perwujudan kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi
3. Faktor lingkungan sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap perwujudan kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi.
4. Kompetensi guru PKn, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap kecerdasan berdemokrasi warga negara muda sebagai peserta didik
5. Faktor lingkungan sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap kecerdasan berdemokrasi warga negara muda sebagai peserta didik
6. Kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kecerdasan berdemokrasi peserta didik.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni melalui metode survei. Langkah berikutnya dalam penelitian ini menggunakan paradigma tambahan dengan pendekatan kualitatif untuk pendalaman. Pada tahap ini digunakan wawancara, dan observasi yang sifatnya kualitatif.

I. Lokasi Dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah Rayon 10 Universitas Pendidikan Indonesia dalam menyelenggarakan sertifikasi pendidikan, yang meliputi Kota dan Kabupaten Bandung; Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka; Kabupaten Indramayu; Kabupaten Sumedang. Untuk lebih memperluas cakupan wilayah, ditambah dengan Kota Sukabumi, Kabupaten Garut dan Kabupaten Purwakarta.